

RENCANA KERJA
POLRES METRO JAKSEL T.A. 2021

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2021 merupakan tahun Kedua dari Tahapan Rencana Strategis Polres Metro Jaksel 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polres Metro Jaksel T.A. 2020 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres Metro Jaksel T.A. 2021. Rencana Kerja Polres Metro Jaksel T.A. 2021 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Polres Metro Jaksel 2020-2024. Rencana Kerja Polres Metro Jaksel T.A. 2021 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban; dan (5) pilar keamanan Siber.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana Terorisme, Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat, akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat.....

masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah: (1) Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta penyebaran Covid-19 dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pemberlakuan MEA, pengiriman

TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah.

Semua isu strategis, baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polres Metro Jaksel T.A. 2021.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polri yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan.

1) Global

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

- a) langkah pemerintah Amerika Serikat yang mengubah fokus ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan untuk mendorong dan menyeimbangkan berbagai konflik di Asia. Keterlibatan AS di Asia mendukung negara-negara sekutunya membuat konflik semakin panas. Pasukan AS di Asia membuat ketegangan meningkat;
- b) masih memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin memanas sangat berpengaruh terhadap perekonomian global. Kenaikan tarif impor yang dilakukan baik oleh Amerika Serikat maupun Cina sebesar 25% dari sebelumnya sebesar 10% akan berimbas pada menurunnya impor kedua negara tersebut. Hal ini perlu diwaspadai karena akan berdampak juga pada kemungkinan menurunnya ekspor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat maupun Cina,

mengingat.....

mengingat kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia serta saat ini status Indonesia menjadi negara maju oleh Amerika Serikat;

- c) dinamika ekonomi politik global juga terjadi dengan adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Selain itu, persaingan antarnegara juga terjadi pada pembangunan infrastruktur kawasan Asia Afrika, di mana Tiongkok mendorong kerja sama Belt and Road Initiative (BRI), sementara Amerika Serikat menginisiasi pendanaan pembangunan infrastruktur kawasan Asia Afrika dengan investasi Better Utilization of Investments Leading to Development (BUILD) Act;
- d) kondisi wilayah Suriah semakin kondusif dan telah terjadi pergeseran para militan Pok ISIS dilaporkan melarikan diri ke gurun Irak dari basis pertahanan terakhir mereka di Irak disamping itu juga terjadi pergeseran pasukan AS dari Suriah ke Irak dan berbatasan langsung dengan Iran Barat guna melawan militant ISIS;
- e) menghadapi masalah etnis Uighur di Cina telah terjadi penindasan terhadap warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di wilayah Xinjiang yang memicu keprihatinan dan kemarahan umat muslim di Indonesia;
- f) fluktuasi harga minyak dunia terus mempengaruhi aktivitas perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh:
 - (1) situasi politik negara penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal;
 - (2) menurunnya harga BBM dan meningkatnya konsumsi BBM;
 - (3) penurunan cadangan minyak bumi;
 - (4) aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional;
- g) masih.....

- g) masih terus terjadinya perubahan iklim (climate change) sebagai akibat penggunaan bahan bakar fosil, industrialisasi dan alih fungsi lahan, telah menghasilkan efek pemanasan global (global warming) yang telah meningkatkan suhu permukaan bumi serta munculnya berbagai ragam penyakit dan gangguan kesehatan manusia di seluruh dunia;
- h) situasi keamanan internasional masih terus diwarnai oleh isu konflik di Palestina, Irak dan Suriah. Di samping itu, pengaruh isu demokratisasi liberal akan semakin meluas dan memicu terjadinya konflik bersenjata di seluruh negara-negara kawasan Timur Tengah, yang ditengarai strategi AS dan sekutunya untuk menguasai ladang minyak;
- i) konflik yang sering terjadi di kawasan Afrika merupakan kepentingan dalam memperebutkan Sumber Daya Alam. Afrika yang kaya akan hasil tambang dan minyak bumi, menjadi rebutan dari kekuatan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan kekuatan Rusia dan RRC. Perebutan sumber daya alam tersebut membuat Afrika menjadi kawasan tidak pernah lepas dari konflik dan kekerasan berujung kepada pertempuran bersenjata ataupun rivalitas antar etnis;
- j) munculnya terorisme sebagai musuh bersama dalam pola penanganannya cenderung telah berubah dari pola pre-emptive strike menjadi pola penanganan yang lebih mengedepankan cara-cara diplomatis dan persuasif mengingat isu global di Suriah (ISIS) dan isu regional di Xinjian (muslim Uighur);
- k) pandemi Covid-19 telah menyebar di 176 negara, sudah 9.278 orang meninggal dunia, 130.538 orang masih berjuang namun telah 85.831 orang dapat diselamatkan.

2) Regional

Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Indonesia.

Lingkungan.....

Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi beberapa isu, yaitu: konflik politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara, baik perbatasan darat, laut, dan udara, kerja sama antara negara Asean di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:

- a) masih berlanjutnya interaksi hubungan Cina dengan kekuatan utama di kawasan seperti AS, Jepang, Rusia dan Uni Eropa merupakan faktor berpengaruh dalam peta keamanan kawasan, khususnya di Asia Pasifik. Hubungan politik RRC dengan Cina Taiwan masih tetap menjadi fokus isu keamanan kawasan bagi masyarakat internasional karena akan mewarnai prospek keamanan kawasan Asia Pasifik dan dunia pada umumnya;
- b) memanasnya hubungan bilateral antara Indonesia-Australia yang beberapa kali mengalami pasang surut, karena Australia mempunyai kepentingan dengan Indonesia dalam menangkal terorisme dan manusia perahu/pencari suaka. Kondisi ini tidak lepas dari orientasi politik dan kepentingan pemerintahan berkuasa di sana. Sebagai anggota FPDA, Australia menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-negara persemakmuran antara lain Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategis membuat Australia memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan Indonesia. Amerika telah menambah pasukan dan perseniataannya di Australia, dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia;
- c) konsep Keamanan Laut Australia Marine Identification Zone (AMIZ) yang menjangkau perairan utara Indonesia meliputi Laut Halmahera, Laut Sulawesi dan sebagian besar Laut Jawa sampai dengan perairan Selandia Baru dapat menimbulkan sengketa perbatasan;
- d) masih perlu diantisipasi masalah isu Melanesian Brotherhood (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka.

Vanuatu dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh OPM di Vanuatu tergabung dalam organisasi West Papuan Peoples Representative (WPPRO) dan aktif melakukan kegiatan propaganda;

- e) banyak negara di Pasifik Selatan menghadapi masalah lingkungan karena sempitnya lahan untuk hidup dan bersikap pragmatis. Sebagian penduduknya melakukan migrasi ke berbagai negara tetangga, seperti Australia dan Indonesia bagian timur. Wilayah air mereka banyak disewakan pihak asing. Kegiatan-kegiatan mereka tidak dapat dikontrol berakibat meningkatnya kejahatan transnasional seperti Narkoba dan pencucian uang (money laundering) berimplikasi terhadap keamanan wilayah Indonesia bagian timur;
- f) isu keamanan banyak bersumber dari gangguan keamanan dilakukan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) memanfaatkan wilayah PNG. Seringkali anggota OPM masuk ke wilayah PNG menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Penyelundupan senjata dari Australia melalui Selat Torres ke PNG ditukarkan Narkoba dan minuman keras kecenderungannya akan terus berlanjut;
- g) kondisi ekonomi masyarakat di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sampai saat ini masih bergantung negara lain sehingga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kasus penyelundupan barang-barang komoditi ke negaranya. Hubungan diplomatik Indonesia dengan RDTL terdapat beberapa permasalahan perlu diselesaikan, seperti adanya keberatan masyarakat perbatasan merasa menguasai/memiliki tanah secara turun-temurun dimasukkan wilayah RDTL;
- h) Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara termasuk dalam Segitiga Emas (The Golden Triangle) menjadi sorotan dunia, negara-negara kawasan Asia Tenggara mengecam peredaran Narkoba ancaman bangsa. Persoalan Kamboja.....

Kamboja dengan negara tetangga, seperti Thailand adalah tanda tapal batas sementara dengan Vietnam seputar kedaulatan sekitar lepas pantai;

- i) hingga saat ini pemerintah Filipina masih menghadapi berbagai masalah keamanan dalam negeri, khususnya pemberontakan di Filipina Selatan dilakukan Moro Islamic Liberation Front (MILF), Misuuri Break Awcro Group (MBG), dan Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG), walaupun sudah semakin terdesak namun masih melakukan tindakan kekerasan berupa teror dan penculikan warga Filipina maupun orang asing dengan sasaran mendapatkan uang tebusan. Kelompok tersebut disinyalir masih ada kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia. Mereka sering melakukan penyanderaan terhadap kapal yang lewat dengan meminta tebusan;
- j) hingga saat ini Singapura belum bersedia melakukan pembicaraan masalah perbatasan wilayah laut dengan kepulauan Riau, secara lisan menyatakan bahwa adanya proyek reklamasi wilayah timur Changi dikatakan tidak mengubah kedudukan dan batas landasan kontinen sudah ada;
- k) kelompok Al Jemaah Al Islamiyah berbasis di Malaysia telah membangun jaringan terorisme dengan kelompok garis keras/radikal di Indonesia. Kelompok ini cenderung menggunakan wilayah Indonesia sebagai daerah operasinya karena dianggap lebih memungkinkan dari sisi ideologi, ekonomi, sosial budaya dan sistem keamanannya. Berbagai aksi terorisme di Indonesia disinyalir melibatkan kelompok tersebut.

3) Nasional

Lingkungan strategis nasional tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astagatra. Aspek Astagatra dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Tri Gatra dan Panca Gatra yang berkembang di dalam negeri dipengaruhi oleh lingkungan strategi global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis

nasional.....

nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam negeri. Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibmas dari aspek Asta Gatra:

a) Geografi

- (1) kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak langsung (Darat dan perairan laut) dengan negara tetangga, sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnasional, termasuk pencurian ikan di perairan wilayah Indonesia;
- (2) kondisi geografi wilayah Indonesia yang masuk dalam Ring of Fire Pacific (Sabuk Api Pasifik) dan Sabuk Alpine, maka wilayah Indonesia rawan terjadinya Bencana Gempa Bumi Vulkanik. Selain hal tersebut di atas Indonesia dikelilingi oleh lempengan-lempengan bumi, antara lain lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Hal tersebut menjadi penyebab rawan terjadinya Bencana Gempa Bumi Tektonik, apabila lempengan-lempengan itu bergeser, patah, atau bahkan terjadi tumbukan;
- (3) wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman, namun dalam perkembangannya berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyelundupan barang, penyelundupan kayu (illegal logging), dan peredaran gelap Narkoba serta banyak pula sungai-sungai di Indonesia menjadi tambang emas ilegal dengan memanfaatkan bahan kimia jenis merkuri, sehingga terjadi pencemaran lingkungan di beberapa sungai di Indonesia.

b) Demografi

- (1) Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga penambahan jumlah penduduk

cepat.....

cepat, penyebaran dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal maupun horizontal;

- (2) sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (3) sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar dan banyak aliran. Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan aksi teror;
 - (4) berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 sebanyak 267 juta, sedangkan untuk tahun 2020 diproyeksikan meningkat ke 269,6 juta jiwa. Dan terdistribusi pada wilayah seluas 220.953.634 (km²), dengan jumlah wilayah administratif 349 kabupaten, 91 kota, 5.263 kecamatan, 7.113 kelurahan, dan 62.806 desa di seluruh Indonesia;
- c) Sumber Daya Alam
- (1) negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam sangat berlimpah tidak hanya berupa bahan tambang, tetapi juga hutan, air, tanah yang subur dan laut yang luas. Hal di atas menjadi aspek yang diperebutkan oleh negara yang terbatas atau tidak memiliki sumber daya alam untuk mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia. Hal tersebut jika
tidak

tidak terkendali ke depan justru akan menjadi permasalahan untuk generasi penerus yang tidak lagi dapat memanfaatkannya;

- (2) sumber daya alam Indonesia yang kaya akan menjadi incaran negara asing dengan mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah dan kepentingan ekonomi negara internasional, yang akan berimplikasi langsung maupun tidak langsung kepada situasi di dalam negeri;
- (3) kondisi sumber daya alam Indonesia selain merupakan potensi bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian rakyat, apabila tidak dikelola dan diamankan dengan optimal, maka dapat berpotensi menjadi gangguan kerusakan ekosistem yang akan mengakibatkan terjadinya bencana alam;
- (4) hilangnya hewan dan tumbuhan langka akibat eksploitasi tambang hutan gambut, akan merusak ekosistem. Sehingga akan berpotensi mengakibatkan terjadinya krisis pangan akibat pengalihan fungsi lahan di sentra wilayah pertanian baik legal maupun secara ilegal.

d) Ideologi

- (1) penganut faham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan "kebebasan" tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;
- (2) sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, timbul upaya dan keinginan dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah mengubah Pancasila dengan ideologi lain seperti: paham khilafah oleh HTI, faham liberal atau faham sosialis/komunis;

(3) bendera.....

- (3) bendera merah putih dan lagu Indonesia raya dianggap oleh kelompok tertentu sebagai sesuatu yang tidak harus wajib dihormati bahkan dianggap musyrik hal ini dilakukan di sekolah-sekolah Islam yang berafiliasi ke negara Islam Indonesia serta kelompok garis Islam lainnya;
 - (4) adanya kelompok sipil bersenjata atau separatis (KKB di Papua), (KTB di Poso) dan sisa-sisa Pok GAM di Aceh, kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) kelompok inilah yang berupaya ingin memisahkan diri dari NKRI maupun ingin mendirikan NII.
- e) Politik
- (1) sistem politik demokratis, bertumpu pada kedaulatan rakyat ditopang budaya politik sehat, yaitu perilaku santun, mengedepankan perdamaian, anti kekerasan dalam berbagai bentuk, dan sifat sportif diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat, dan efektif;
 - (2) Unras massa yang dilakukan oleh BEM se-Indonesia yang mendesak presiden untuk menerbitkan Perpu guna mencabut Revisi UU KPK hal ini akan tetap berlanjut terkait isu pemberantasan korupsi di Indonesia;
 - (3) pro dan kontra pelaksanaan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur masih akan tetap mewarnai dinamika politik tahun 2021;
 - (4) penerapan kebijakan otonomi khusus mencerminkan adanya ketidakserasian antara semangat otonomi daerah berlebihan dengan prinsip NKRI. Otonomi khusus diberikan kepada daerah tertentu dapat memicu kecemburuan daerah lain menuntut hal sama. Penerapan otonomi khusus diharapkan mempercepat pembangunan daerah, namun kenyataannya tidak memberikan manfaat langsung, berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga menimbulkan wacana penolakan sebagian masyarakat daerah dan mendorong menguatnya sebagian.....

tuntutan memisahkan diri dari NKRI hal ini dilakukan karena pengelolaan dana Otsus sering disalahgunakan oleh Pemda.

f) Ekonomi

- (1) komitmen Indonesia merespons agenda prioritas Pertemuan Ketiga G-20 Development Working Group (DWG) di Australia, antara lain: Food Security and Nutrition, Financial Inclusion and Remittance dan Infrastructure merupakan upaya merespons kebijakan pemerintah sejalan visi dan misi Presiden, yaitu: politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari dan budaya yang berkepribadian. Pertemuan yang membahas finalisasi komitmen dan penyiapan rekomendasi terhadap beberapa agenda prioritas DWG, antara lain Food Security and Nutrition, Financial Inclusion and Remittance dan Infrastructure sesuai upaya pemerintah sekarang ini;
- (2) pelemahan perekonomian global sangat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, Indonesia menjadi salah satu negara memiliki daya pikat investasi memiliki pasar cukup luas dengan jumlah penduduknya sekitar 250 juta. Kondisi ekonomi nasional saat ini begitu tertekan oleh perekonomian global dan penyebaran wabah virus corona, fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS serta tekanan dari ekonomi AS dan Tiongkok, berdampak kepada Indonesia, hampir semua negara ASEAN mengalami tekanan pengaruh ekonomi global sendiri-sendiri, atau bergandeng tangan, rapatkan barisan, dan menahan tekanan bersama-sama;
- (3) kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi, dengan menggulir Dana Desa guna menunjang pembangunan di daerah, saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan di berbagai wilayah Indonesia;

(4) pelemahan.....

- (4) pelemahan rupiah juga dialami beberapa kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menunjang penguatan kurs rupiah, hal ini disebabkan adanya penyebaran Covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk paruh pertama tahun 2020;
 - (5) penerapan kebijakan “omnibus law” bidang investasi dan ketenagakerjaan yang akan menimbulkan berbagai persoalan terkait kedudukan UU Omnibus Law belum diatur serta berbenturan dengan daerah bahwa yang mengatur adalah daerahnya sendiri.
- g) Sosial budaya
- (1) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa, namun pada sisi lain keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa jika penegakan hukum lemah;
 - (2) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Penguatan identitas kedaerahan atau kesukuan akibat penerapan otonomi daerah mendorong terjadinya konflik sosial, terutama dalam ketentuan dan larangan PNS menggunakan cadar dan celana cingkrang serta jenggot, masalah haji, umroh dan penanganan sengketa tempat ibadah serta penyebaran faham yang bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia yang bertolak belakang dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
 - (3) pemahaman.....

- (3) pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama;
- (4) pembangunan sektor pendidikan masih dihadapkan pada kualitas pendidikan dan pengajaran masih rendah, sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi syarat kompetensi termasuk permasalahan infrastruktur dan pro kontra sistem pengajaran;
- (5) pembangunan sektor kesehatan masih dihadapkan permasalahan kenaikan iuran BPJS, disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang minim, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, kurangnya pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, rendahnya status kesehatan penduduk miskin, serta kendala ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku obat, ketersediaan obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan. Perilaku dan pola hidup masyarakat pada umumnya belum peduli terhadap masalah kesehatan, telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit menular, seperti: virus wabah Covid-19, demam berdarah (DBD), TBC, flu burung (AI), HIV/ AIDS, muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax, dan lain-lain.

h) Keamanan.....

h) Keamanan

- (1) masih belum optimalnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia oleh Polri, seperti pelabuhan laut dan udara, serta terbatasnya kerja sama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. Di samping perkembangan organisasi kejahatan internasional didukung kemajuan iptek, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan bersifat transnasional, seperti peredaran Narkoba dan terorisme sulit untuk ditangani;
- (2) penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan, dan menunjukkan hasil cukup membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspasi karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain: kejahatan siber, terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara;
- (3) ancaman keamanan tidak hanya datang dari negara tetapi juga aktor non negara, seperti perusahaan, kelompok tertentu maupun individu. Cakupan ancaman tidak semata dalam kedaulatan dan teritorial tetapi justru mengarah isu kemanusiaan. Ancaman tidak hanya berupa weapon terrorism, tetapi juga disease terrorism dan environmental terrorism. Pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, hilangnya keanekaragaman hayati dan radioaktif adalah ancaman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (4) secara umum, situasi keamanan di beberapa wilayah Papua, Papua Barat, Aceh dan Maluku yang memiliki potensi konflik vertikal dan horizontal yang dipicu oleh masalah intoleransi, ideologi, separatisme isu diskriminasi etnis serta kesejahteraan masih diwarnai adanya manuver

politik dalam rangka membangkitkan semangat memisahkan diri dari NKRI, namun hal tersebut hanya merupakan manuver politik sekedar menunjukkan eksistensi gerakan separatis;

- (5) penerapan otonomi khusus (Otsus) di Papua masih belum sepenuhnya diterima masyarakat setempat. Hal ini ditandai masih adanya kegiatan kelompok pro kemerdekaan untuk mewujudkan pemisahan diri dari NKRI. Gerakan separatis Papua memanfaatkan jaringan politik internasional dengan memanfaatkan isu HAM, melalui pembentukan kaukus parlemen internasional untuk Papua mendapat dukungan beberapa anggota parlemen Inggris dan kongres AS. Pembangunan jaringan politik internasional dilakukan atas fasilitasi dan bantuan NGO lokal dan asing mendukung kelompok pro kemerdekaan;
- (6) pasca terdesaknya gerakan ISIS di Irak dan Suriah tidak secara otomatis ancaman terorisme di Indonesia mengendur namun akan sesuai dengan propaganda para tokoh ISIS yang disampaikan melalui jaringan media sosial;
- (7) kejahatan siber atau kejahatan melalui jaringan Internet menjadi ancaman bagi stabilitas nasional, pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan tersebut yang dilakukan pelaku/sindikatis dengan teknologi jaringan internet dan intranet, muncul beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs dan menyadap transmisi data orang lain. sehingga kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil (perbuatan seseorang memasuki komputer orang lain tanpa izin), dan delik materiel (perbuatan menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain).

4) Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya

a) Geografi

- (1) Wilayah hukum Polres Metro Jaksel berbatasan dengan Jakarta Pusat, Depok, dan Tangerang sebagai pendukung;
- (2) Posisi wilayah Jakarta Selatan memiliki karakteristik yang berbatasan dengan Jakarta Pusat, Depok, Tangerang, pada waktu-waktu tertentu apabila hujan deras dan terus menerus di wilayah hulu menyebabkan banjir di sekitar / sepanjang aliran kali ciliwung, sebagian wilayah Utara kota Jakarta digenangi oleh air laut yang pasang sehingga menyebabkan terjadinya banjir dan aktivitas masyarakat terganggu.
- (3) Posisi Jakarta Selatan sebagai dari ibukota negara, dan pusat pemerintahan mempunyai konsekuensi menjadi barometer seluruh wilayah/daerah, sehingga berbagai masalah yang terjadi di daerah akan dibawa ke pusat/Jakarta untuk mendapatkan penyelesaian yang dinilai adil. Disamping itu juga kota Jakarta menjadi pintu masuk berbagai hal dari luar negeri, sehingga kota Jakarta juga mengemban tugas sebagai etalase bagi masyarakat Internasional dalam memandang Indonesia sehingga permasalahan keamanan muncul seperti keimigrasian dan penyelundupan orang, barang dan Narkoba;
- (4) kondisi masyarakat heterogen baik dari segi sosial budaya, sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang merata, merupakan potensi timbulnya kerawanan/konflik antar kelompok dan kepentingan yang dapat mengganggu Kamtibmas. Dalam persaingan antar kelompok mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan.

b) Demografi.....

b) Demografi

- (1) Sebagai bagian dari pusat pemerintahan, dan ibukota negara maka kota Jakarta menjadi sasaran, dan tujuan kedatangan masyarakat dari seluruh Indonesia dengan berbagai harapan, dan kepentingan sehingga berbagai suku dari seluruh Indonesia terdapat di kota Jakarta, sedangkan suku Betawi sebagai penduduk asli mulai tergusur keberadaannya. Disamping penduduk Indonesia asli, tidak sulit pula menemukan WN Asing dari berbagai negara di dunia, hal tersebut tidak lepas dari posisi kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan pintu gerbang Indonesia;
- (2) Dengan jumlah penduduk yang besar disamping sebagai modal dasar pembangunan juga mengandung kerawanan dengan dimensi kerawanan yang luas dan kompleks. Hal tersebut disebabkan masih belum berimbang laju penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia dan sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut adalah tingginya angka pengangguran;
- (3) Karena penambahan jumlah penduduk yang sangat cepat, menjadikan penyebaran dan kepadatan yang tidak merata, serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya maka berpotensi terhadap berbagai masalah sosial, dan keamanan dengan dimensinya yang kompleks dan luas, antara lain meningkatnya premanisme, gelandangan, dan pengemis, WTS dan lain-lain. Dengan pertambahan jumlah penduduk, perlu adanya kesiapan Polri dalam melayani masyarakat.

c) Sumber Daya Alam

- (1) selain dari Air Tanah, sumber air di wilayah Jakarta berasal dari Bogor yang mengalir ke Jakarta melalui sungai Ciliwung, dan anak sungai Ciliwung. Air ini digunakan untuk memenuhi.....

memenuhi kebutuhan air minum setelah dilakukan penjernihan oleh PDAM yang saat ini dikelola oleh dua perusahaan dari Perancis dan Inggris;

- (2) Aliran air dari Bogor disamping sebagai bahan baku air minum warga DKI Jakarta juga menjadi salah satu penyumbang banjir di DKI Jakarta. Banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pola hidup warga masyarakat DKI Jakarta yang membuang sampah sembarangan, sistem drainase yang kurang baik, penyempitan alur sungai serta kondisi tanah DKI Jakarta 40% berada dibawah permukaan laut.
 - (3) Kondisi sumber daya alam di wilayah Polres Metro Jaksel apabila tidak dikelola dan diamankan dengan baik, merupakan potensi kerawanan berupa :
 - (a) Penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang merugikan negara;
 - (b) Kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam, dan penyakit yang melanda ternak maupun manusia;
 - (c) Persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.
- d) Ideologi
- (1) Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia masih diterima oleh bangsa Indonesia, namun sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, muncul keinginan dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberal dan faham sosialis/komunis, cenderung masih akan terus berlanjut;
 - (2) Kegiatan eks napi politik yang memperjuangkan ideologinya seperti ideologi komunis masih terus dilakukan, beberapa tokoh muda ditenggarai sudah masuk dalam berbagai

Parpol bahkan duduk menjadi fungsionaris, indikasi adanya upaya menghidupkan ideologi komunitas antara lain:

- (a) Hingga saat ini eks G 30 S PKI masih eksis memperjuangkan peninjauan status hukum mereka dengan meminta ganti rugi, disamping mereka tetap menuntut hak-haknya dalam bidang politik;
 - (b) Eks Napi G 30 S PKI membentuk organisasi yang secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas perjuangan mereka dibidang politik, ekonomi dan budaya.
- (3) Adapun indikator masih eksisnya aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang berhaluan kiri/komunis antara lain berupa :
- (a) Ditemukannya gambar palu arit di berbagai tempat umum;
 - (b) Pembentukan Lembaga - lembaga yang memperjuang katurunan/keluarga PKI yang dihukum pada era pemerintahan Orde Baru;
 - (c) Seminar/dialog/lokakarya/pertemuan yang dihadiri oleh eks Napol/ Tapol PKI, dan PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru) untuk mengoreksi diskriminasi;
 - (d) Peredaran bahan bacaan yang dibuat oleh eks Tapol/Napol PKI.
- (4) Kalangan Islam radikal tetap eksis memperjuangkan penggunaan hukum/ syariat Islam sebagai dasar negara, indikator upaya menerapkan syariat Islam di Indonesia, antara lain :
- (a) Berlangsungnya pertemuan komunitas Islam dengan mendatangkan pembicara dari luar negeri dengan tema pembentukan kekhilafahan Islam Internasional;

(b) Kegiatan.....

- (b) Kegiatan yang dilakukan beberapa Ormas Islam seperti jamaah Ansyorul Tauhid, IMM, dsb, yang berisi penolakan terhadap kebijakan–kebijakan pemerintah tentang kerukunan antar umat beragama karena tidak sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Kelompok faham liberal dengan memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi, dan HAM mempengaruhi para politisi, LSM, cendikiawan dan berbagai elemen bangsa menuntut, dan memperjuangkan “kebebasan” tanpa mengindahkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia;
- (6) Kelompok eks Napi masih akan terus melakukan berbagai pertemuan untuk memperjuangkan keinginan mereka mendapat rehabilitasi dan ganti rugi sementara kelompok Islam radikal maupun kelompok Liberal masih akan terus eksis melakukan aktivitasnya meskipun hingga saat ini hanya bagian terkecil masyarakat Jakarta yang bergabung, namun dengan berjalannya waktu diperkirakan akan semakin bertambah jumlah massanya.
- (7) Ambang gangguan dibidang ideologi adalah sebagai berikut :
 - (a) Masih ada upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pendahulu kita. Antara lain keinginan menjadikan Indonesia menjadi negara dengan bentuk kekhalifahan serta berlandaskan hukum Islam. Kelompok ini cukup agresif dalam mengkampanyekan bentuk negara kekalifahan;
 - (b) Masih eksis upaya membangkitkan ideologi komunis dimana mereka justru merekrut kalangan muda/mahasiswa. Komunitas ini banyak bermunculan di kampus–kampus dengan melakukan aktivitas

secara.....

secara sembunyi–sembunyi maupun terang–terangan dengan cover kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan social kemasyarakatan;

- (c) Perkembangan dukungan masyarakat Indonesia terhadap ISIS semakin bertambah sehingga banyak warga negara indonesia yang turut berjuang ke luar negeri di suriyah.
- e) Sosial Budaya
- (1) Jakarta Selatan dan sekitarnya adalah daerah yang dikelilingi oleh perusahaan asing, sehingga timbul berbagai masalah sosial antara lain : Pemukiman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, tenaga kerja yang didominasi pendatang, pendatang tanpa keterampilan yang memadai, lingkungan yang kumuh, kesemerawutan berlalulintas dan pencemaran lingkungan;
 - (2) penertiban bangunan liar untuk kepentingan pembangunan, sering menimbulkan perlawanan didorong beberapa faktor antara lain: harga ganti rugi tidak cukup untuk membeli tanah di tempat lain; warga enggan pindah karena dekat dengan tempat kerjaan dan sekolah anak serta sudah cukup lama mendiami tempat tersebut; maupun kurangnya sosialisasi program pembangunan dari pemerintahan setempat; warga merasa tidak diajak musyawarah serta adanya campur tangan/*Back Up* oleh Ormas/LSM kepada warga;
 - (3) Masalah perburuhan masih akan bergulir setiap tahun karena akan selalu ada issue-issue baru yang digunakan oleh para buruh untuk tema aksi unjuk rasa terutama Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP), Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);

(4) Masih.....

- (4) Masih tingginya angka kemacetan di wilayah Jakarta Selatan karena masih belum sempurnanya pembangunan sistem angkutan massal (busway, monorail, dll) serta sedang dilaksanakan pekerjaan Underpass, Fly over dan pelebaran jalan sehingga keluhan kemacetan masih terus berlanjut;
 - (5) Masih terjadinya penolakan terhadap rumah/tempat yang digunakan untuk ibadah dikhawatirkan akan memicu kasus SARA dan konflik Sosial;
 - (6) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat berimplikasi terhadap terjadinya berbagai bentuk bencana alam seperti banjir dan kebakaran;
 - (7) Permasalahan Korupsi di instansi pemerintah baik di Jakarta maupun diluar Jakarta masih menjadi daya tarik bagi kelompok-kelompok massa, Ormas/LSM/Mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPK, depan Istana Negara;
 - (8) Rencana kebijakan lain yang akan dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta antara lain :
 - (a) Sistem ERP (elektronik road pricing);
 - (b) Pembatalan pulau Reklame;
 - (c) Penataan Kampung Aquarium.
- f) Keamanan
- (1) Masih rendahnya tingkat pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan
 - (2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengamankan diri, dan lingkungannya yang menganggap bahwa masalah keamanan adalah hanya tanggung jawab aparat keamanan.
 - (3) Turunnya kepatuhan, dan disiplin masyarakat terhadap hukum sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa, dan cenderung dalam menangani masalah keamanan masyarakat bertindak main hakim sendiri.
 - (4) Berbagai

- (4) Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan di bidang politik, sosial ekonomi masyarakat maupun kondisi sosial budaya.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polres Metro Jaksel dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Polres Metro Jaksel memiliki personel sebanyak 1.538 orang terdiri dari Polri 1.487 orang dengan kepangkatan Pamen 54 orang, Pama 239 orang, Bintara 1.194 orang. Sedangkan ASN 51 orang terdiri dari Gol. III 19 orang, Gol. II 31 orang, Gol. I 1 orang dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Tren peningkatan 4 jenis kejahatan menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polres Metro Jaksel seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja

Personel

Personel Polres Metro Jaksel dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polres Metro Jaksel semakin tinggi mengharuskan Polres Metro Jaksel menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam mewujudkan Kamdagri. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polres Metro Jaksel pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya tingkat pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan;
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengamankan diri, dan lingkungannya yang menganggap bahwa masalah keamanan adalah hanya tanggung jawab aparat keamanan.
- c. Turunnya kepatuhan, dan disiplin masyarakat terhadap hukum sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa, dan cenderung dalam menangani masalah keamanan masyarakat bertindak main hakim sendiri.
- d. Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan di bidang politik, sosial ekonomi masyarakat maupun kondisi sosial budaya.
- e. Peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat;
- f. Masih tingginya konflik sosial, aksi *sweeping*, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- g. Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- h. Semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
- i. Masih tingginya kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas;
- j. Banyak kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang belum tertangani dan perlu penanganan khusus;
- k. Penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;

II. Tujuan dan Sasaran

3. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polri

1) Visi

terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib.

2) Misi

Melindungi, Melayani dan Mengayomi masyarakat.

b. Visi dan Misi Polda Metro Jaya

1) Visi

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum
Polda Metro Jaya

2) Misi

Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di lingkungan Polda
Metro Jaya

c. Visi dan Misi Polres Metro Jaksel

3) Visi

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum
Polres Metro Jaksel

4) Misi

Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di lingkungan
Polres Metro Jaksel

4. Tujuan Jangka Menengah

a. Polri, adapun tema pembangunan Polri adalah “Menjaga Stabilitas
Kamtibmas untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Sosial”.

1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat
di seluruh wilayah NKRI;

2) menegakkan hukum secara berkeadilan;

3) modernisasi pelayanan Polri;

4) mewujudkan Polri yang profesional;

5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Polda.....

b. Polda Metro Jaya

Tujuan Polda Metro Jaya dalam kurun waktu lima tahun perencanaan (2020-2024) yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban di seluruh daerah hukum Polda Metro Jaya;
- 2) Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta;
- 3) Modernisasi pelayanan Polda Metro Jaya;
- 4) Mewujudkan Polri yang profesional; dan
- 5) Menerapkan manajemen Polda Metro Jaya yang terintegrasi dan terpercaya.

c. Polres Metro Jaksel

Tujuan Polres Metro Jaksel dalam kurun waktu lima tahun perencanaan (2020-2024) yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban di seluruh daerah hukum Polres Metro Jaksel;
- 2) Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jaksel;
- 3) Modernisasi pelayanan Polres Metro Jaksel;
- 4) Mewujudkan Polri yang profesional; dan
- 5) Menerapkan manajemen Polres Metro Jaksel yang terintegrasi dan terpercaya.

5. Sasaran Prioritas

a. Polri

Sasaran Prioritas Polri Tahun 2021 yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) **Pertama** “Harkamtibmas yang Kondusif guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial termasuk di Wilayah Perbatasan NKRI”;

2) **Kedua**.....

- 2) **Kedua** “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri”;
 - 3) **Ketiga** “Penegakan Hukum Secara Berkeadilan dan Terpercaya”;
 - 4) **Keempat** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”;
 - 5) **Kelima** “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”;
 - 6) **Keenam** “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”.
- b. Polda Metro Jaya
- 1) **Pertama** “Harkamtibmas yang Kondusif dalam rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas Khususnya di Sektor Industri, Pariwisata dan Investasi serta di Wilayah Perbatasan Polda Metro Jaya”;
 - 2) **Kedua** “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri”;
 - 3) **Ketiga** “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”;
 - 4) **Keempat** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda Metro Jaya”;
 - 5) **Kelima** “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”;
 - 6) **Keenam** “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”.
- c. Polres Metro Jaksel
- 1) **Pertama** “Harkamtibmas yang Kondusif dalam rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas Khususnya di Sektor Industri, Pariwisata dan Investasi serta di Wilayah Perbatasan Polres Metro Jaksel”;
 - 2) **Kedua** “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri”;
 - 3) **Ketiga** “Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”;
 - 4) **Keempat** “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polres Metro Jaksel”;
 - 5) **Kelima** “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”;

- 6) **Keenam** “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”.

III. Kebijakan dan Strategi Tahun 2021

6. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2021.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2021 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Harkamtibmas yang Kondusif guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial termasuk di Wilayah Perbatasan NKRI”, yaitu:

- 1) peran intelijen Polri dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial

(giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

- a) untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- b) meningkatkan penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/komunitas perempuan, workshop pencegahan kejahatan, melanjutkan pelatihan Tim Sosialisasi Kejahatan Cyber;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) penggalangan.....

- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;
(giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1);
 - d) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dengan keluarganya.
(giat5076,3143/prog4,11/SP1/ SS1/IKU1);
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui “Community Policing”;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 4) penanganan konflik secara humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/ Komunitas Perempuan guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial.
(giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 5) meningkatkan peran Polri di wilayah rawan bencana dan wabah;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pelaksanaan.....

- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana; (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) menyiapkan personel Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholder dalam penanggulangan bencana; (giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana; (giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - d) bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas.
(giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1);
- 6) mewujudkan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) melaksanakan pembangunan Indonesia Safety Driving Center (ISDC); (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) melaksanakan pembangunan RTMC/TMC; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - d) pemasangan ETLE; (giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 7) terlaksananya pengamanan event nasional/internasional tahun 2021;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pelaksanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/Internasional tahun 2021;

(giat5079/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- 8) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisional;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- 1) kesiapan personel Polri untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;

(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- 2) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;

(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- 3) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif.

(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- 9) peningkatan kerja sama dalam/luar negeri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembuatan MOU dengan K/L terkait dalam rangka meningkatkan sinergi polisional; (giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- b) peningkatan kerja sama polisional dalam rangka kerja sama internasional guna meningkatkan citra Polri di mata internasional (giat3122/prog4/SP1/SS1/IKU1);

- 10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah industri, Pariwisata serta perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) patroli.....

- a) patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan;
(giat3135/prog4/SP1/SS1/IKU1).
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri”, yaitu:
- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP11);
 - b) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat3071,3084/prog1,2/SP2/SS4/IKP4);
 - c) melaksanakan pengadaan Alsuspol yang modern dan berbasis TIK; (giat3071,3084/prog2/SP2/ SS4/IKP4);
 - d) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3071,3084/prog1,2/SP2/ SS5/IKP11);
 - e) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3071/prog4/SP1/ SS5/IKP11);

2) peningkatan.....

- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP11);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan Hukum Secara Berkeadilan dan Terpercaya”, yaitu:
 - 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;
(giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2);
 - b) meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba (TPPU), terorisme, karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak
(giat3142, 3144, 3145, 3146, 5083 prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - c) melanjutkan peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala Internasional, regional dan internasional; (giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - d) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel (giat3084/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2);
 - b) meningkatkan.....

- b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2);
- c) peningkatan sertifikasi jumlah penyidik Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2);
- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
mengembangkan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan).
(giat5086/prog2/SP3/SS2/IKU2);
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”, yaitu:
 - 1) pembenahan pola Diklat yang siap kerja (vokasi);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) upgrading dan sertifikasi Gadik/instruktur;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1);
 - b) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas;
(giat3100,5076,3130/prog3,4/SP4/SS1,3/IKP1);
 - c) peningkatan kapasitas SDM bidang siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik;
(giat3100,3151/prog3,5/SP4/SS2,3/IKP1);
 - d) sertifikasi profesi anggota Polri
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1);
 - e) pelatihan Revolusi mental di lingkungan Polri;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1);
 - 2) penataan kelembagaan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penerapan.....

- a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
 - b) melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
 - c) menyelenggarakan penataan kelembagaan tipe Polres;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
 - d) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan Polres, Polsek dan Polsubsektor;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
 - e) menyusun kebijakan penataan eselonisasi dan arsitektur kelembagaan.
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
- 3) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi kepolisian; (giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1);
 - b) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri;
(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP1);
- 4) kajian peningkatan Tunkin lebih dari 70%;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengajukan usulan kenaikan persentase tunjangan kinerja lebih dari 70%;
(giat5054/prog1/SP4/SS5/IKP7);
 - b) meningkatkan nilai AKIP dan nilai RB Polri;
(giat5054/prog1/SP4/SS5/IKP7,11);
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”, yaitu:

1) pengembangan.....

- 1) pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Alsuspol sesuai dengan teknologi terkini;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - b) melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat3133/prog4/SP5/SS5/IKP3);
 - c) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel;
(giat3084/prog5/SP5/SS5/IKP4);
 - d) melanjutkan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polri;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - e) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - f) pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4);
 - g) melaksanakan sertifikasi dan standardisasi Alpalkam dan Almatsus Polri
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- 2) peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melakukan.....

- a) melakukan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan prototype, berikut melakukan Standardisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - b) menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - c) melanjutkan dan melaksanakan inventarisasi Alpalkam dan Almatsus Polri yang dapat dilaksanakan oleh BUMNIS dan ISN;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- 3) menyusun katalogisasi Alsuspol Fungsi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polri;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - b) melaksanakan pembangunan metadata identifikasi terorisme.
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- 4) pembangunan SPKT tingkat Polres dan Polsek serta pembangunan Satpas sesuai SPM secara online;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online single submission dalam penerbitan surat izin opsional BUJP
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3);
- 5) pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan siber.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pengembangan Almatsus Siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
 - b) pembangunan Cyber Digital Lab pada Unit Siber di Kewilayahan.
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4).

- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
 - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
 - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat5086/prog5/SP6/SS5/IKP13);
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar (giat5086/prog5/SP6/SS3/IKP14);
 - 2) penguatan Saber pungli;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
 - b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Mabes Polri;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
 - c) mengintensifkan.....

- c) mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli yang membajak program pemerintah;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14);
 - b) melanjutkan penyusunan Perkadiv tentang hukuman bagi pejabat yang tidak patuh untuk melaksanakan wajib lapor LHKPN;
(giat3155/prog1/SP6/SS5/IKP14);
 - c) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian.
(giat3088/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- 4) pengawasan berbasis TI;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/prom6);
 - b) penerapan sistem pengaduan masyarakat secara online.
(giat3084/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan pendampingan Satker/Satwil atas pemenuhan Indikator Pencapaian Kinerja Polri Berkelas Dunia guna persiapan dilakukan survei kepuasan pengguna terhadap pemenuhan indikator WISPI dan UNPSA;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);

b) mempertahankan.....

- b) mempertahankan capaian Satker/Satwil zona integritas yang sudah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil zona integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);
- c) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polres Metro/ Polrestabes/ Polresta/ Polres dan Satker Polda;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);
- d) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);
- e) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta /Polrestabes dan Polres Metro agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);
- f) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar Polri berpeluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10).

7. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Metro Jaya Tahun 2021.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2021 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Harkamtibmas yang Kondusif guna Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial termasuk di Wilayah Perbatasan NKRI”, yaitu:

1) peran intelijen Polri dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial

(giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/SS1/IKU1);

2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

b) meningkatkan penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/ komunitas perempuan, workshop pencegahan kejahatan, melanjutkan pelatihan Tim Sosialisasi Kejahatan Cyber;

(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);

c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;

(giat5076/prog4/SP1/ SS1/IKU1);

d) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dengan keluarganya.

(giat.....

- (giat5076/prog4,11/SP1/ SS1/IKU1);
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui “Community Policing”;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP.
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 4) penanganan konflik secara humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas Perempuan guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 5) meningkatkan peran Polri di wilayah rawan bencana dan wabah;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b) bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas.
(giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1);
- 6) mewujudkan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan.....

- a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - b) melaksanakan pembangunan Indonesia Safety Driving Center (ISDC);
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - c) melaksanakan pembangunan RTMC/TMC;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
 - d) pemasangan ETLE;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 7) peningkatan kerja sama dalam/luar negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
pembuatan MOU dengan K/L terkait dalam rangka meningkatkan sinergi polisional;
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- 8) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah industri, Pariwisata serta perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(giat3134/prog4/SP1/SS1/IKU1);
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polri”, yaitu:
- 1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk
memberikan.....

- memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP11);
- b) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat3071,3084/prog1,2/SP2/SS4/IKP4);
- c) melaksanakan pengadaan Alsupol yang modern dan berbasis TIK;
(giat3071,3084/prog2/SP2/ SS4/IKP4);
- d) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3071,3084/prog1,2/SP2/ SS5/IKP11);
- e) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3071/prog4/SP1/ SS5/IKP11);
- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP11);
- b) melaksanakan pelatihan revolusi mental dibidang pelayanan.
(giat3100/prog5/SP2/SS5/IKP11).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan Hukum Secara Berkeadilan dan Terpercaya”, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;
(giat3134/prog4/SP3/SS2/IKU2);
 - b) meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba (TPPU), terorisme, karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak
(giat3142, 3144, 3145, 3146, 5083 prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - c) melanjutkan peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba skala Internasional, regional dan internasional;
(giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - d) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel
(giat3084/prog5/SP3/SS2/IKU2);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2);
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2);
 - c) peningkatan sertifikasi jumlah penyidik Polair Korpolaairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2);
- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan.....

- a) melakukan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - b) mengembangkan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan).
(giat5086/prog2/SP3/SS2/IKU2);
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”, yaitu:
- 1) pembenahan pola Diklat yang siap kerja (vokasi);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas;
(giat3100,5076,3130/prog3,4/SP4/SS1,3/IKP1);
 - b) peningkatan kapasitas SDM bidang siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik;
(giat3100,3151/prog3,5/SP4/SS2,3/IKP1);
 - c) sertifikasi profesi anggota Polri
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1);
 - d) pelatihan Revolusi mental di lingkungan Polri;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1);
 - 2) penataan kelembagaan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
 - b) melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
 - c) menyelenggarakan penataan kelembagaan tipe Polres;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
 - d) melaksanakan.....

- d) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan Polres, Polsek dan Polsubsektor;
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
 - e) menyusun kebijakan penataan eselonisasi dan arsitektur kelembagaan.
(giat5052/prog1/SP4/SS5/IKP11);
- 3) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi kepolisian;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1);
 - b) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri;
(giat3072/prog1/SP4/SS3/IKP1);
- 4) kajian peningkatan Tunkin lebih dari 70%;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengajukan usulan kenaikan persentase tunjangan kinerja lebih dari 70%;
(giat5054/prog1/SP4/SS5/IKP7);
 - b) meningkatkan nilai AKIP dan nilai RB Polri;
(giat5054/prog1/SP4/SS5/IKP7,11);
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pengembangan Almatsus Kepolisian yang Modern secara Bertahap dan Berkelanjutan”, yaitu:
- 1) pengembangan dan pemenuhan kebutuhan minimal Alsuspol sesuai dengan teknologi terkini;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam
rangka.....

rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi;

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);

b) melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;

(giat3133/prog4/SP5/SS5/IKP3);

c) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel;

(giat3084/prog5/SP5/SS5/IKP4);

d) melanjutkan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polri;

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);

e) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);

f) pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;

(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4);

g) melaksanakan sertifikasi dan standardisasi Alpalkam dan Almatsus Polri

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);

2) peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melakukan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan prototype, berikut melakukan Standardisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;

(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);

b) menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;

(giat.....

- (giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- c) melanjutkan dan melaksanakan inventarisasi Alpakam dan Almatsus Polri yang dapat dilaksanakan oleh BUMNIS dan ISN;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- 3) menyusun katalogisasi Alsuspol Fungsi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengadaan Alpakam dan Almatsus Polri;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- b) melaksanakan pembangunan metadata identifikasi terorisme.
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- 4) pembangunan SPKT tingkat Polres dan Polsek serta pembangunan Satpas sesuai SPM secara online;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online single submission dalam penerbitan surat izin opsional BUJP
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP3);
- 5) pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan siber.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pengembangan Almatsus Siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4);
- b) pembangunan Cyber Digital Lab pada Unit Siber di Kewilayahan.
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4).
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;
(giat.....

- (giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat5086/prog5/SP6/SS5/IKP13);
- e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar (giat5086/prog5/SP6/SS3/IKP14);
- 2) penguatan Saber pungli;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Mabes Polri;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- c) mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli yang membajak program pemerintah;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan.....

- a) melanjutkan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri (giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14);
 - b) melanjutkan penyusunan Perkadiv tentang hukuman bagi pejabat yang tidak patuh untuk melaksanakan wajib lapor LHKPN; (giat3155/prog1/SP6/SS5/IKP14);
 - c) meningkatkan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian. (giat3088/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- 4) pengawasan berbasis TI;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) optimalisasi pengawasan melalui aplikasi e-pengawasan; (giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/prom6);
 - b) penerapan sistem pengaduan masyarakat secara online. (giat3084/prog1/SP6/SS5/IKP13);
- 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pendampingan Satker/Satwil atas pemenuhan Indikator Pencapaian Kinerja Polri Berkelas Dunia guna persiapan dilakukan survei kepuasan pengguna terhadap pemenuhan indikator WISPI dan UNPSA; (giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);
 - b) mempertahankan capaian Satker/Satwil zona integritas yang sudah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil zona integritas berpredikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);

- c) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polres Metro/ Polrestabes/ Polresta/ Polres dan Satker Polda;

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);

- d) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan;

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);

- e) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes dan Polres Metro agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10);

- f) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) agar Polri berpeluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10).

IV. Program, Kegiatan dan Rencana Kebutuhan Indikatif T.A. 2021

8. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

1) Tujuan

Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan

- a) Penerangan Masyarakat;
- b) Penyelenggaraan Humas;
- c) Pelayanan Kesehatan Polri;
- d) Dukungan Pelayanan Gaji dan tunjangan;
- e) Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
- f) Manajemen Anggaran;
- g) Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

1) Tujuan

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan :

- a) pengembangan peralatan Polri;
- b) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras.

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri

1) Tujuan

Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi.

2) Kegiatan.....

- 2) Kegiatan
 - a) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri;
 - b) Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri;
 - c) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan.
- d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
 - 1) Tujuan

Terpeliharanya Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi strategi keamanan dan ketertiban.
 - 2) Kegiatan
 - a) Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban;
 - b) Analisis Keamanan;
 - c) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik;
 - d) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
 - e) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya;
 - f) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara.
- e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
 - 1) Tujuan

Terpeliharanya Pemberdayaan Potensi Keamanan melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi Potensi Keamanan.
 - 2) Kegiatan
 - a) Pembinaan Potensi Keamanan;

- f. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 1) Tujuan
Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.
 - 2) Kegiatan
 - a) Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - d) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara;
 - e) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital;
 - f) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas.
- g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- 1) Tujuan
Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - 2) Kegiatan
 - a) Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
 - b) Penindakan Tindak Pidana Umum;
 - c) Penindakan Tindak Pidana Narkoba;
 - d) Penindakan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Program pengembangan hukum Kepolisian
- 1) Tujuan
Terwujudnya hukum Kepolisian melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - 2) Kegiatan
 - a) Penyusunan dan Penyuluhan Hukum.

9. Rencana Kebutuhan Indikatif Polres Metro Jaksel T.A. 2021

Alokasi anggaran Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan Rencana Kebutuhan Indikatif T.A. 2021 sebesar Rp. 180.213.747.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

- a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri dengan anggaran sebesar Rp. 136.043.787.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - 1) penerangan masyarakat sebesar Rp. 239.106.000,-;
 - 2) penyelenggaraan humas sebesar Rp. 5.100.000,-;
 - 3) pelayanan kesehatan Polri sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - 4) dukungan pelayanan Gaji dan tunjangan Rp. 133.406.581.000,-;
 - 5) operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp. 2.357.300.000,-;
 - 6) manajemen anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - 7) pengelolaan Informasi dan dokumentasi sebesar Rp. 700.000,-;
- b. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri dengan usulan anggaran sebesar Rp. 14.040.392.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - 1) pengembangan peralatan Polri sebesar Rp.331.060.000,-;
 - 2) dukungan manajemen dan Teknik Sarpras sebesar Rp.13.709.332.000,-;
- c. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri dengan usulan anggaran sebesar Rp. 176.130.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
 - 1) penyelenggaraan pengamanan internal Polri sebesar Rp.120.200.000,-;
 - 2) penegakan tata tertib dan disiplin Polri sebesar Rp. 8.270.000,-;
 - 3) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan sebesar Rp.47.660.000,-.
- d. program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban dengan usulan anggaran sebesar Rp. 2.398.178.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :

- 1) dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 207.632.000,-;
 - 2) analisis keamanan sebesar Rp. 307.388.000,-;
 - 3) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik sebesar Rp. 424.241.000,-;
 - 4) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi sebesar Rp. 334.768.000,-;
 - 5) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya sebesar Rp. 407.241.000,-;
 - 6) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara sebesar Rp. 716.908.000,-.
- e. program pemberdayaan potensi keamanan sebesar Rp. 2.098.993.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
- pembinaan potensi keamanan sebesar Rp. 2.098.993.000,-.
- f. program Harkamtibmas dengan usulan anggaran sebesar Rp. 9.221.748.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
- 1) dukungan manajemen dan teknis Harkamtibmas Rp. 3.138.104.000,-;
 - 2) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara sebesar Rp. 2.075.544.000,-;
 - 3) penyelenggaraan pengamanan obyek vital sebesar Rp. 158.400.000,-;
 - 4) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas sebesar Rp. 3.849.700.000,-;
- g. program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan usulan sebesar Rp. 16.207.937.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
- 1) penindakan tindak pidana umum sebesar Rp. 12.329.305.000,-;
 - 2) penindakan tindak pidana narkoba sebesar Rp. 3.718.632.000,-;
 - 3) penindakan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 160.000.000,-;
- h. Program pengembangan hukum Kepolisian dengan usulan sebesar Rp. 26.582.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan :
- penyusunan dan penyuluhan hukum sebesar Rp. 26.582.000,-.

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Polres Metro Jaksel T.A. 2021 berdasarkan alokasi Pagu Indikatif Polres Metro Jaksel T.A. 2021 disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Polres Metro Jaksel T.A. 2021.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 29 Juli 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKSEL



BUDI SARTONO, S.I.K., M.S.I.

KOMIRAN BESAR POLISI NRP 75050536